

Pemblokiran Situs ✓

Radikal Dapat Dukungan

JAKARTA-Upaya Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) melakukan pemblokiran situs radikal mendapat dukungan dari berbagai kalangan. Meski demikian, beberapa situs yang dikabarkan diblokir masih bisa diakses melalui laptop dan komputer. "Pemblokiran beberapa situs radikal di Indonesia sangat tepat dilakukan. Dalam kehidupan beradab dan berdemokrasi tidak dibenarkan tindakan radikal, apalagi mengatasnamakan agama," kata Emrus Sihombing, pengamat komunikasi Universitas Pelita Harapan, Jakarta kepada wartawan, Selasa (31/3).

Di negara demokrasi seperti Indonesia, lanjut dia, tidak boleh ada usaha-usaha mendorong, menciptakan, dan melakukan tindakan radikal oleh satu kelompok ke kelompok lain.

"Setajam apapun konflik, tidak dibenarkan mengambil tindakan melalui kekerasan dari atau ke siapapun juga. Dalam berperang sekalipun ada aturan dan etika yang harus ditaati oleh banyak pihak," kata Emrus.

Karena itu, CEO Survey Lintas Nusantara ini menilai penutupan situs-situs radikal tersebut sudah tepat. Radikalisme tidak boleh ditanamkan melalui teknologi komunikasi misalnya internet. "Teknologi Informasi (TI) harus digunakan untuk kemaslahatan manusia, bukan untuk menyebarkan faham radikalisme yang dapat menghancurkan sesuatu," kata Emrus yang juga mengingatkan pemerintah akan adanya situs-situs yang terlihat moderat tapi sebenarnya mengandung unsur radikalisme.

Emrus juga mendukung langkah pemerintah yang sudah tepat

mengawasi dan melawan radikalisme yang tersebar di Indonesia melalui dunia maya seperti Kemenkominfo dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Menurutnya, ada dua keahlian utama yang dibutuhkan pada lembaga ini yaitu, keahlian Information Technology (IT) yang mengurus teknologi komunikasi, termasuk memblokir dan menghadapi serangan virus yang dapat merusak jaringan internet yang kita gunakan melawan faham radikalisme. "Kedua, keahlian menganalisa, merancang pesan yang mampu melawan dan 'menjinakkan' isi pesan radikal yaitu, ilmuwan komunikasi. Kemasan pesan yang dibangun juga harus mampu menciptakan deradikalisme di tengah masyarakat," jelasnya.

Ketua PB NU Slamet Effendi Yusuf mengatakan, langkah Kemenkominfo harus didukung dalam rangka memberantas radikalisme. Hal itu dinilai wajar lantaran imbas dan ancaman radikalisme melalui media massa saat ini sangat besar. "Saya setuju asal itu adalah langkahantisipasi untuk mencegah menyebarnya faham radikalisme. Kalau mereka (situs, Red) yang diblokir menyebarkan faham radikal atau bahkan pro dengan ISIS (Islamic State of Iraq and Syria), memang harus dilarang, bahkan diberantas di bumi Indonesia," tegasnya.

Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi BNPT Mayjen TNI Agus Surya Bakti mengatakan, pihaknya kini konsen dalam upaya membendung radikalisasi di dunia maya yang dilakukan ISIS. "Kelompok ini menjadi luar biasa dan Indonesia menjadi sasaran bagi mereka untuk merekrut anggota baru," tandasnya. (dms)